



Integrasi Kebijakan dan Partisipasi Publik dalam Rapat Koordinasi Penyediaan Angkutan Umum di Provinsi Sulawesi Tenggara

The Policy Integration and Public Participation in the Coordination Meeting on Public Transportation Provision in Southeast Sulawesi Province

Sylsiani Mursalim^{1*}, Galih Adi Sulistyo², Syaiful³, Ringo Taufan Laode⁴,
Rina Sutriana⁵, Maudhy Satyadharma⁶

¹ Prodi Teknik Sipil Institut Mekongga, Indonesia

²Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Indonesia

^{3,4,5,6} Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia

*Penulis Korespondensi: sylsiani@gmail.com

Article History:

Naskah Masuk: 15 November 2025;

Revisi: 17 Desember 2025;

Diterima: 19 Januari 2026;

Terbit: 21 Januari 2026

Keywords: Collaboration;

Coordination Meeting; Public

Transportation; Transportation

Services; Transportation.

Abstract: This study aims to analyze policy integration and the level of public participation in the implementation of coordination meetings on public transportation provision in Southeast Sulawesi Province as a strategic effort to improve the quality of land transportation services. This coordination meeting was held on December 3, 2025, involving various stakeholders, including the Southeast Sulawesi Provincial Transportation Agency, the Regency/City Transportation Agency throughout Southeast Sulawesi, Perum DAMRI, and the Passenger Transportation Legal Entity. The research method used was descriptive qualitative with a policy and institutional analysis approach, supported by data from discussions, meeting minutes, and related policy documents. The results showed that the coordination meeting activities were able to strengthen policy understanding between agencies, increase the effectiveness of institutional coordination, and encourage synergy between the role of the government and transportation business actors. In addition, this forum also played a significant role in formulating joint strategies to improve the quality of public transportation services, including aspects of route planning, service standards, and operational sustainability. Through a structured coordination mechanism and discussion, each party gained a more comprehensive understanding of their respective roles, authorities, and responsibilities in the implementation of regional transportation. Thus, this coordination meeting is an important instrument in supporting collaborative and public service-oriented transportation governance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi kebijakan serta tingkat partisipasi publik dalam pelaksanaan rapat koordinasi penyediaan angkutan umum di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan transportasi darat. Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2025 dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, antara lain Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Perhubungan kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara, Perum DAMRI, serta Badan Hukum Angkutan Penumpang. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan dan kelembagaan, yang didukung oleh data hasil diskusi, notulensi rapat, serta dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan rapat koordinasi mampu memperkuat kesepahaman kebijakan antarinstansi, meningkatkan efektivitas koordinasi kelembagaan, serta mendorong sinergi peran antara pemerintah dan pelaku usaha transportasi. Selain itu, forum ini juga berperan penting dalam merumuskan strategi bersama untuk peningkatan kualitas layanan angkutan umum, termasuk aspek perencanaan rute, standar pelayanan, dan keberlanjutan operasional. Melalui mekanisme koordinasi dan diskusi yang terstruktur, setiap pihak memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam penyelenggaraan transportasi daerah. Dengan demikian, rapat koordinasi ini menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola transportasi yang kolaboratif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kata Kunci: Angkutan Umum: Kolaborasi: Rapat Koordinasi: Transportasi: Pelayanan Transportasi.

1. PENDAHULUAN

Transportasi darat memegang peran utama dalam menunjang mobilitas penduduk dan distribusi barang di berbagai wilayah Indonesia, terutama pada daerah yang belum memperoleh layanan memadai dari moda transportasi lain seperti perkeretaapian dan transportasi laut reguler (Astuti et al., 2023; Marlina & Natalia, 2017; Rahayu & Martini, 2022). Peran strategis transportasi darat tidak hanya mendukung konektivitas antarwilayah, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pemerataan pembangunan dan penguatan dinamika ekonomi masyarakat (Kadarisman et al., 2016). Walaupun memiliki peran strategis, penyelenggaraan angkutan darat masih dibayangi oleh berbagai persoalan teknis, kelembagaan, dan kebijakan, terutama dalam pelayanan angkutan umum yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Beberapa persoalan mendasar dalam penyediaan angkutan umum di banyak daerah adalah lemahnya koordinasi antarinstansi, belum optimalnya sistem perizinan, rendahnya pemanfaatan terminal, serta ketidakteraturan operasional angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) (Arruan et al., 2025; Syaiful et al., 2024). Perubahan perilaku pengguna jasa yang cenderung menginginkan layanan angkutan yang lebih fleksibel, ditambah dengan hadirnya angkutan berbasis aplikasi, turut memperbesar kompleksitas pengelolaan angkutan umum di daerah (Afdhila, 2024; La Ode et al., 2024). Kondisi ini menuntut pendekatan tata kelola sektor transportasi yang lebih kolaboratif, adaptif, dan terintegrasi lintas pemerintahan serta pelaku usaha (Purwita et al., 2025).

Di Provinsi Sulawesi Tenggara, penyelenggaraan angkutan umum, khususnya angkutan penumpang dan angkutan barang antar kota dalam satu provinsi, masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kepatuhan perizinan, belum optimalnya pendataan trayek dan armada, serta keterbatasan pengawasan terpadu (Mahdar et al., 2023). Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas layanan kepada masyarakat, tetapi juga berpotensi menurunkan tingkat keselamatan, efektivitas distribusi barang, dan daya saing ekonomi wilayah. Selain itu, keterbatasan anggaran pengawasan serta minimnya sinergi operasional antar pemerintah daerah menyebabkan upaya penertiban dan pembinaan angkutan umum belum berjalan secara maksimal (Fadhillah et al., 2024; Raihan et al., 2025).

Dalam hal tersebut, penguatan tata kelola melalui Rapat Koordinasi Penyediaan Angkutan Umum menjadi langkah strategis dan relevan (Wibowo, 2020). Kegiatan ini dirancang sebagai forum konsolidasi kebijakan, pertukaran informasi lapangan, serta penyamaan persepsi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, UPTD teknis, BUMN transportasi, dan pelaku usaha angkutan. Rapat koordinasi tidak hanya berfungsi

sebagai sarana komunikasi kelembagaan, tetapi juga sebagai instrumen penguatan kapasitas pemangku kepentingan dalam merumuskan solusi bersama terhadap permasalahan penyelenggaraan angkutan umum di wilayah Sulawesi Tenggara (Satyadharma et al., 2024).

Kegiatan ini menegaskan pentingnya kolaborasi multi-pihak dalam penyelenggaraan transportasi daerah (Satyadharma & Susanti, 2024; Sentanu & Yustiari, 2024). Pemerintah Provinsi berperan sebagai regulator dan koordinator utama, pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana layanan di wilayah masing-masing, sementara operator angkutan bertindak sebagai penyedia jasa transportasi kepada masyarakat (Nuhun et al., 2024). Integrasi kebijakan yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat kepatuhan terhadap regulasi, mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana terminal, serta mendorong terciptanya sistem transportasi darat yang aman, tertib, dan berkelanjutan.



Gambar 1. Rapat Koordinasi Penyediaan Angkutan Umum.

Sumber : Dishub Sultra (2025).

Tujuan utama pelaksanaan Rapat Koordinasi Penyediaan Angkutan Umum ini adalah meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan angkutan umum yang tertib dan berkualitas, mendorong harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara, mengidentifikasi berbagai permasalahan lapangan yang dihadapi dalam pengelolaan angkutan umum, serta merumuskan rekomendasi bersama sebagai dasar penguatan tata kelola transportasi darat di tingkat provinsi yang selaras dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.

2. METODE

Rancangan metode pelaksanaan kegiatan disusun untuk membangun pemahaman yang menyeluruh sekaligus memperkuat komitmen bersama di antara seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan yang digunakan mencakup beberapa tahapan utama sebagai berikut:

a. Rapat Koordinasi Teknis

Rapat koordinasi dilaksanakan dengan melibatkan unsur Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota, Perum Damri, serta perwakilan asosiasi operator angkutan. Forum ini difokuskan pada pembahasan permasalahan penyelenggaraan angkutan penumpang, berbagai tantangan implementasi kebijakan, serta klarifikasi pembagian kewenangan dalam pengelolaan transportasi darat.

b. Diskusi Kelompok Terarah (FGD)

Diskusi kelompok terarah dilaksanakan untuk menggali permasalahan di lapangan, mengidentifikasi hambatan operasional, serta menampung aspirasi dari masyarakat dan operator angkutan. Selain itu, FGD menjadi sarana perumusan alternatif solusi dan rekomendasi yang bersifat aplikatif dan realistis.

c. Perumusan Masukan dan Rekomendasi

Seluruh masukan, hasil temuan, dan analisis yang diperoleh selama kegiatan selanjutnya disusun secara sistematis menjadi rekomendasi bersama sebagai dasar tindak lanjut kebijakan dan implementasi di lapangan.

3. HASIL DAN DISKUSI

Diskusi yang berkembang dalam FGD memperlihatkan bahwa permasalahan angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) tidak bersifat parsial, melainkan sistemik dan berakar pada struktur tata kelola transportasi secara nasional. Perubahan pola perilaku penumpang yang semakin mengutamakan fleksibilitas, kecepatan, dan kenyamanan mendorong terjadinya pergeseran preferensi dari layanan angkutan konvensional menuju layanan yang lebih individual dan berbasis aplikasi (Melo et al., 2024). Fenomena ini berdampak langsung pada menurunnya tingkat okupansi armada AKDP dan melemahnya posisi terminal sebagai simpul utama pergerakan penumpang. Terminal yang seharusnya berfungsi sebagai pusat pelayanan, pengawasan, dan pengendalian operasional justru semakin ditinggalkan, sehingga memperbesar ruang terjadinya praktik menaikkan dan menurunkan penumpang di luar ketentuan yang berlaku (Hasina & Satyadharma, 2023).

Di sisi lain, lemahnya kepatuhan terhadap perizinan memperburuk kondisi tersebut. Banyak armada yang beroperasi tanpa kelengkapan izin trayek, izin operasional, maupun uji

kelayakan kendaraan yang memadai (Satyadharma et al., 2025). Hal ini tidak hanya mengganggu tertib administrasi, tetapi juga meningkatkan risiko keselamatan pengguna jasa dan menurunkan kualitas pelayanan publik. FGD menegaskan bahwa persoalan perizinan tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan administratif, melainkan harus diintegrasikan dengan pembinaan, edukasi, serta penegakan hukum yang konsisten (Saputra et al., 2023).

Keterbatasan pengawasan menjadi faktor lain yang memperparah permasalahan AKDP. Kegiatan pengawasan terpadu memerlukan dukungan anggaran yang besar, koordinasi lintas sektor, serta sumber daya manusia yang memadai. Tanpa mekanisme pengawasan yang berkelanjutan dan terstruktur, berbagai kebijakan yang telah ditetapkan cenderung berhenti pada tataran normatif tanpa berdampak nyata di lapangan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, serta instansi terkait lainnya menjadi kebutuhan mutlak dalam membangun sistem pengawasan yang efektif (Latullah et al., 2025).

Respon Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara mencerminkan pemahaman atas kompleksitas persoalan tersebut. Penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dipandang sebagai fondasi utama untuk memastikan keseragaman kebijakan, konsistensi implementasi, serta kejelasan pembagian kewenangan. Optimalisasi fungsi terminal sebagai simpul pengawasan dan pelayanan diharapkan mampu mengembalikan peran strategis terminal tidak hanya sebagai tempat naik turun penumpang, tetapi juga sebagai titik kontrol keselamatan, ketertiban, dan kualitas layanan angkutan (Hasina & Satyadharma, 2023; Prasetyo & Anindita, 2024).

Lebih lanjut, penguatan sistem perizinan diposisikan sebagai instrumen utama dalam menciptakan ketertiban angkutan (Mangunsong, 2025; Salsabilla et al., 2025; Satyadharma et al., 2025). Perizinan yang tertib, transparan, dan terintegrasi akan memudahkan pengawasan, meningkatkan kepatuhan operator, serta memperkuat perlindungan bagi pengguna jasa (Julianti, 2024; Satyadharma, 2024). Sementara itu, pengawasan terpadu yang melibatkan kepolisian dan instansi terkait dipandang sebagai mekanisme kunci untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Secara keseluruhan, hasil diskusi menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan AKDP membutuhkan pendekatan kolaboratif, berkelanjutan, dan berbasis kelembagaan. Tanpa sinergi lintas pemerintahan dan pelaku usaha, berbagai upaya perbaikan hanya akan bersifat sementara dan tidak mampu menjawab tantangan struktural dalam penyelenggaraan transportasi darat di

daerah.



Gambar 2. Foto Bersama peserta Kegiatan Rapat Koordinasi Penyediaan Angkutan Umum.

Sumber : Dishub Sultra (2025).

Adapun rekomendasi dari Rapat Koordinasi antar instansi ini melahirkan beberapa point diantaranya :

a. Pendataan dan Penataan Trayek AKDP Terpadu

Pendataan dan penataan trayek AKDP secara terpadu menjadi dasar perbaikan tata kelola angkutan darat (Fadhillah et al., 2024; Hanila & Payana, 2024). Basis data yang akurat mengenai armada, trayek, dan legalitas akan meningkatkan efektivitas perencanaan, mencegah tumpang tindih layanan, serta memperkuat fungsi pengawasan. Penataan berbasis data memungkinkan distribusi armada lebih merata sesuai kebutuhan wilayah, meningkatkan efisiensi operasional, serta menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib dan berkeadilan bagi operator maupun masyarakat (La Ode et al., 2024).

b. Optimalisasi Pengawasan Terpadu

Pengawasan terpadu yang melibatkan Dishub Provinsi, Dishub kabupaten/kota, dan Ditlantas sangat penting untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi angkutan (Gunawan, 2020). Sinergi pengawasan memperkuat pembinaan operasional, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menekan pelanggaran izin dan keselamatan (Laode et al., 2025). Model ini mendorong konsistensi implementasi kebijakan di lapangan, membangun disiplin operator, serta meningkatkan perlindungan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan angkutan umum.

c. Penguatan Kesepahaman Kebijakan sebagai Penggerak Ekonomi

Kesepahaman kebijakan antar pemangku kepentingan memperkuat peran transportasi

sebagai penggerak ekonomi daerah (Lestari et al., 2025). Sinkronisasi kebijakan mencegah tumpang tindih kewenangan, meningkatkan kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat, serta mendukung pengembangan sektor produktif dan pariwisata. Transportasi tidak hanya berfungsi sebagai layanan publik, tetapi sebagai infrastruktur strategis yang mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah (Bénichou, 2024; Polyzos & Tsiotas, 2020).

4. KESIMPULAN

Kegiatan ini terbukti mampu memperkuat kesepahaman kebijakan antar pemangku kepentingan, meningkatkan efektivitas koordinasi kelembagaan, serta merumuskan strategi bersama dalam rangka peningkatan kualitas layanan transportasi darat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Melalui forum koordinasi dan diskusi yang terstruktur, setiap pihak memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing dalam penyelenggaraan transportasi daerah. Proses ini tidak hanya memperbaiki komunikasi antarlembaga, tetapi juga membangun kepercayaan dan komitmen kolektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan transportasi secara kolaboratif. Sinergi multi-stakeholder yang terbentuk menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan berkelanjutan. Selain berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, hasil kegiatan ini juga berkontribusi terhadap penguatan peran transportasi sebagai penggerak ekonomi daerah dan instrumen peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Afdhila, A. N. (2024). *Fenomena perubahan perilaku pengguna angkutan umum di era digital (Studi kasus masyarakat Kecamatan Kepanjen)* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Raden Rahmat].
- Arruan, R. D., Syaiful, Wardhani, A. K., Hasiholan, F., Kardita, P. C. P., Mallawangeng, T., Bua', R. T., Pratama, A. P., Susanto, H. A., & Sombolinggi, A. T. (2025). *Perencanaan transportasi*. Arsy Media.
- Astuti, S. D., Angraini, T. N., Firdaus, I. M., Taufik, Nurochman, Sahara, S., & Verawati, K. (2023). Pengaruh moda transportasi darat terhadap kelancaran bongkar muat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(13), 599–607. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8158069>
- Bénichou, W. (2024). Sustainable development of transport infrastructure in the system of national economy. *Journal of Economics, Innovative Management and Entrepreneurship*, 1(1). <https://doi.org/10.59652/jeime.v1i1.116>

- Fadhillah, M., Rusli, Z., & Mayarni, M. (2024). Penertiban angkutan umum AKDP (antar kota dalam provinsi) di Kota Pekanbaru. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 5347–5354. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13725>
- Gunawan, B. (2020). *Analisis fungsi pengawasan Dinas Perhubungan dalam menertibkan kendaraan bertonase besar di Kota Pekanbaru* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau].
- Hanila, D., & Payana, M. D. (2024). Implementasi sistem informasi angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) di Dinas Perhubungan Aceh. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Inotec*, 6(1), 6–11. <https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jpkmi/article/view/3983>
- Hasina, H., & Satyadharma, M. (2023). Strategi pengembangan fungsi terminal penumpang tipe B di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Journal Publicuho*, 6(1), 246–256. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i1.112>
- Julianti, D. (2024). Strategi kebijakan penguatan pelayanan publik dan pengawasan perizinan berusaha dengan aplikasi berbasis teknologi informasi. *Kybernology: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, 2(2), 324–363. <https://doi.org/10.71128/kybernology.v2i2.131>
- Kadarisman, M., Gunawan, A., & Ismiyati, I. (2016). Kebijakan manajemen transportasi darat dan dampaknya terhadap perekonomian masyarakat di Kota Depok. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTranslog)*, 3(1), 41–58. <https://doi.org/10.25292/j.mtl.v3i1.140>
- La Ode, A. T., Safar, A., Saudi, A. I., Ampangallo, B. A., Syukuriah, Yunus, A. Y., Syaiful, Sampe, R., & Rachman, R. M. (2024). *Transportasi publik*. Tohar Media.
- Laode, R. T., Satyadharma, M., Susanti, N., Cahyaniza, Wirayanti, P., & Hado, H. (2025). Analysis of management of supervision and law enforcement of public goods transportation in Regency of North Kolaka. *Synergy: Journal of Governance and Public Policy*, 1(1), 20–29. <https://sinergijournal.id/index.php/sjgp/article/view/48>
- Latullah, R. H., Sulisty, G. A., Satyadharma, M., & Hado, H. (2025). Collaborative governance dalam pengawasan angkutan barang umum yang berkontribusi terhadap program zero over dimension dan over loading. *Journal of Engineering and Applied Technology*, 1(2), 30–37. <https://doi.org/10.65310/ty3esh07>
- Lestari, S., Susanto, A., & Wahib, M. (2025). Revitalisasi akses transportasi: Strategi untuk memperbaiki pendapatan komunitas pedesaan di Indonesia. *Journal of Economics, Business, Management, Accounting and Social Sciences*, 3(3), 148–158. <https://doi.org/10.63200/jebmass.v3i3.190>
- Mahdar, Satyadharma, M., & Ahmad, S. (2023). Analisis framing penegakan hukum angkutan pada media online detiksultra.com. *KINESIK*, 10(2), 213–222. <https://doi.org/10.22487/ejk.v10i2.876>
- Mangunsong, N. (2025). *Penataan regulasi penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah Istimewa Yogyakarta menuju tata kelola yang efektif* [Disertasi doktor, Universitas Islam Indonesia].
- Marlina, E., & Natalia, D. A. (2017). Land transportation and tourism development. *Journal of Economic & Management Perspectives*, 11(2), 542–554. <https://www.researchgate.net/publication/328677091>

- Melo, S., Gomes, R., Abbasi, R., & Arantes, A. (2024). Demand-responsive transport for urban mobility: Integrating mobile data analytics to enhance public transportation systems. *Sustainability*, 16(11), 4367. <https://doi.org/10.3390/su16114367>
- Nuhun, R., Soeparyanto, T. S., Arsyad, L. O. M. N., Fidmasari, R., & Satyadharma, M. (2024). Peran pemerintah dalam penataan dan penyelenggaraan transportasi di Terminal Tipe B Baruga Kendari. *Bearing: Jurnal Penelitian dan Kajian Teknik Sipil*, 9(2), 111. <https://doi.org/10.32502/jbearing.v9i2.8423>
- Polyzos, S., & Tsiotas, D. (2020). The contribution of transport infrastructures to the economic and regional development. *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management*, 15(1), 5–23. <https://www.researchgate.net/publication/338980259>
- Prasetyo, R. D., & Anindita, R. Y. (2024). Strategi pengendalian terminal bayangan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 223–229. <https://doi.org/10.31258/jkp.v15i2.8484>
- Purwita, A. W., Rustiyana, R., Judijanto, L., Tantrisa, E., Sjioen, M. C., Abdillah, F., & Tedja, J. N. (2025). *Smart city: Konsep dasar dalam penerapan sistem perkotaan berkelanjutan*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahayu, D. K., & Martini, S. (2022). Peran moda transportasi darat dalam mobilitas tenaga kerja. *Jurnal Transportasi*, 22(2), 109–116. <https://doi.org/10.26593/jtrans.v22i2.6061.109-116>
- Raihan, R. M., Rochaeni, A., & AS, Z. A. (2025). Peran Dinas Perhubungan dalam penataan transportasi angkutan umum di Kota Cimahi. *Praxis Idealist: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(1). <https://doi.org/10.36859/jp.v2i1.4227>
- Salsabilla, M., Anwar, M. Y., Putri, A. S. R. L., Warastika, T. E., & Majdi, A. S. (2025). Tinjauan hukum tata negara terhadap izin operasional transportasi truk di Kota Banjarmasin. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(3), 3759–3766. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/490>
- Saputra, Y. J., Satyadharma, M., Susanti, N., & Asis, P. H. (2023). Etika petugas perizinan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 7(2), 561–573. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v7i2.3995
- Satyadharma, M. (2024). Pendampingan dan sosialisasi perizinan berusaha berbasis risiko pada pengusaha dan sopir angkutan barang umum di Kota Baubau. *JCOMMITTS: Journal of Community Empowerment, Innovation, and Sustainability*, 2(2), 13–20. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/JCOMMITTS/article/view/21802>
- Satyadharma, M., & Susanti, N. (2024). Collaborative governance dalam penyelenggaraan transportasi sektor darat di Provinsi Sulawesi Tenggara. *LITERAKOM: Jurnal Literasi dan Komunikasi*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.24036/lk.v2i1.14>
- Satyadharma, M., Mokui, H. T., Putra, A. A., Jaya, L. M. G., Kadir, A., & Arsyad, L. O. M. N. (2024). Peran teknologi informasi dan mekanisme collaborative governance mendukung penyelenggaraan transportasi berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Media Konstruksi*, 9(3), 211–218. <https://doi.org/10.33772/medkons.v9i3.59>
- Satyadharma, M., Susanti, N., & Saputra, Y. J. (2025). Tantangan terhadap kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko mewujudkan good governance (Studi di Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara). *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(1). <https://doi.org/10.70294/jimu.v4i01.1473>

- Sentanu, I. G. E. P. S., & Yustiari, S. H. (2024). *Mengelola kolaborasi stakeholder dalam pelayanan publik*. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Syaiful, S., Susanti, N., Satyadharma, M., Nuhun, R. S., Soeparyanto, T. S., Arsyad, L. O. M. N., & Hado, H. (2024). Sosialisasi dan edukasi tentang perizinan dan pendirian badan hukum bagi para pengusaha dan pengemudi angkutan umum. *Surya Abdimas*, 8(2), 275–283. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i2.4347>
- Wibowo, A. N. F. A. (2020). Collaborative governance dalam pelayanan transportasi publik (Studi BRT Trans Semarang). *Syntax Literate*, 5(3), 1–18. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v5i3.970>